

PENULISAN SKRIPSI

**PENERAPAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI
NEGERI SIPIL TERHADAP PELANGGARAN
NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN
SARMI TAHUN 2017**



Diajukan oleh :

Annethe Lufhanschia Wersemetawar

N P M : 180513211
Program Studi : Hukum
**Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan
Pemerintahan**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

2022

PENULISAN SKRIPSI

**PENERAPAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI
SIPIL TERHADAP PELANGGARAN NETRALITAS
PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PEMILIHAN KEPALA
DAERAH DI KABUPATEN SARMI TAHUN 2017**



Diajukan oleh :

Annethe Lufhanschia Wersemetawar

N P M : 180513211
Program Studi : Hukum
**Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan
Pemerintahan**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

2022

**HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI**

**PENERAPAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
TERHADAP PELANGGARAN NETRALITAS PEGAWAI
NEGERI SIPIL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI
KABUPATEN SARMI TAHUN 2017**



Diajukan oleh:

Annethe Lufhanschia Wersemetawar

NPM : 180513264
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing I

Y. Hartono, S.H., M.Hum.

Dosen Pembimbing II

B. Hengky Widhi Antoro, S.H., M.H.

Tanggal : 24/10/2022

Tanda tangan:

Tanggal : 24/10/2022

Tanda tangan:

**HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI**

**PENERAPAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
TERHADAP PELANGGARAN NETRALITAS PEGAWAI
NEGERI SIPIL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI
KABUPATEN SARMI TAHUN 2017**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : **Senin**
Tanggal : **10 Oktober 2022**
Tempat : **Kampus I Gedung Alfonsus UAJY**

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.
Sekretaris : B. Hengky Widhi Antoro., S.H., M.H.
Anggota : Y. Hartono, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan:

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus atas penyertaan dan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum atau skripsi yang berjudul **“Penerapan Hukuman Disiplin PNS Terhadap Pelanggaran Netralitas PNS Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Sarmi Tahun 2017.”** Meskipun dalam penyusunan skripsi ini banyak kendala dan hambatan yang dialami tetapi penulis dapat melewati dan menyelesaikannya karena kasih dan rahmat Tuhan yang selalu ada tiap hari. Penulis juga menyadari bahwa skripsi yang telah disusun ini jauh dari kata sempurna, sehingga penulis mengharapkan tanggapan, saran, dan kritik dari pembaca. Penulis sangat berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yesus Kristus dan rasa bangga, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

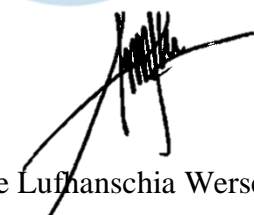
1. Tuhan Yesus Kristus karena penyertaan-Nya yang sempurna sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan hukum ini;
2. Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D. selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
3. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H. M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
4. Bapak Y. Hartono, S.H., M. Hum. dan Bapak B. Hengky Widhi Antoro, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu dengan sabar memberikan masukan, kritik, saran, dan arahan dalam menyusun skripsi ini hingga selesai, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk membimbing penulis;
5. Bapak Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum. selaku dosen penguji sidang skripsi penulis;
6. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, SH., LLM. selaku dosen pembimbing akademik penulis;
7. Ibu Helena Tetelepta, S.H. selaku Sekretaris Inspektorat Kabupaten Sarmi yang sudah bersedia dan meluangkan waktu untuk diwawancarai;

8. Bapak Onli A. Depondoye, S.Tr.Ip. selaku Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sarmi yang sudah bersedia dan meluangkan waktu untuk diwawancarai dan memberikan data-data yang diperlukan penulis;
9. Bapak Leon H.P Buiney S.Sos. selaku Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sarmi yang sudah bersedia dan meluangkan waktu untuk diwawancarai;
10. Bapak Melkior Ch. Aweman, S.Pd.K. selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi yang sudah bersedia dan meluangkan waktu untuk diwawancarai dan memberikan data-data yang diperlukan penulis;
11. Papa dan Mama yang selalu ada untuk mendukung, membantu, memberikan doa, dan motivasi dalam perkuliahan dan juga dalam penyusunan skripsi ini;
12. *My Support System*: Sharon Fuhrensia Wersemetawar, Miroslav Donn Wersemetawar, Hillary Elzha Stevani Wersemewatar, Paulthon Bryan Woromboni, dan Alvario Henry, yang selalu menemani, mengantar, meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam melaksanakan penelitian hingga menyelesaikan skripsi ini;
13. Shanetlav Louzhalovezill yang selalu kompak mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi;
14. Ibu Ethe dan Bapa David yang memberikan dukungan, waktu, membantu dalam proses penelitian dan juga penyusunan skripsi, serta memberikan motivasi, dan juga saran kepada penulis;
15. Keluarga Besar Wersemetawar yang selalu menanyakan progress skripsi;
16. Kami Orang Tersingkir (KOT): Sharon Fuhrensia Wersemetawar, Brayen Herdin Indrawan Lakburawal, Chardio Martin Rumopa, Helmy Dirk Lumalesil yang selalu mendukung dalam proses perkuliahan bahkan dalam penyusunan skripsi;
17. Maria Veronica Giuseppina Bakhita Mau a.k.a Ve yang selalu meneror dan menjawab kebingungan penulis;

18. Everyday Is Monday: Snithzly, Caecilla, Brigitte, Dipta, Rully yang selalu memberikan semangat dalam melewati proses perkuliahan dan juga skripsi;
19. Margaretha, Patricia, dan Endjhel yang selalu memberikan semangat dan siraman rohani dalam melewati proses perkuliahan dan juga perjuangan skripsi;
20. Wacana yang telah memberikan dukungan selama masa perkuliahan sampai pada skripsi;
21. Anace Fransina yang memberikan semangat dalam proses penyusunan tugas akhir.
22. Pihak-pihak yang sudah membantu dalam penyusunan tugas akhir ini. Terima kasih
23. *Last but not least, I wanna thank me I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting. THANK YOU.*

Akhir kata, penulis mendoakan semoga seluruh pihak yang sudah disebutkan di atas diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh golongan masyarakat.

Yogyakarta, 25 September 2022



Annethe Lufhanschia Wersemetawar

ABSTRAK

Netralitas PNS merupakan salah satu tuntutan disiplin PNS yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Meskipun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, pelanggaran netralitas PNS masih sering terjadi di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Sarmi. Pelanggaran ini sering terjadi khususnya pada pemilihan umum kepala daerah. Salah satu pelanggaran netralitas PNS yang terjadi dalam Pilkada di Kabupaten Sarmi adalah pemberian dukungan dengan memberikan KTP PNS. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penerapan hukuman disiplin PNS dan faktor-faktor penghambat diterapkannya hukuman disiplin terhadap pelanggaran netralitas PNS dalam Pilkada di Kabupaten Sarmi tahun 2017. Penulisan hukum ini menggunakan metode hukum normatif yang berfokus pada norma hukum dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa di Kabupaten Sarmi penerapan hukuman disiplin PNS terhadap pelanggaran netralitas PNS dalam Pilkada di Kabupaten Sarmi tahun 2017 belum optimal karena terdapat beberapa hambatan yakni: Ketidapahaman regulasi mengenai netralitas PNS, Kewenangan pengawas pemilu yang masih terbatas, Kurangnya koordinasi lintas sektor (Bawaslu, Inspektorat, BKPSDM, dan KPU), Mempertimbangkan keaktifan dan kinerja PNS yang melakukan pelanggaran netralitas PNS, dan Sulit dalam menjatuhkan hukuman disiplin.

Kata Kunci: disiplin PNS, netralitas, Pilkada, Kabupaten Sarmi

ABSCTRACT

The neutrality of civil servants is one of the demands for civil servant discipline regulated in the regulations. Despite having been regulated in regulations, violations of the neutrality of civil servants are still common in Indonesia, one of which is in Sarmi Regency. This violation often occurs, especially in regional elections. One of the violations of the neutrality of civil servants that occurred in the regional elections in Sarmi Regency was the provision of support by providing civil servant ID cards. This legal research aims to determine the application of civil servant disciplinary punishment and the factors inhibiting the application of disciplinary punishment for violations of civil servant neutrality in the Regional Elections in Sarmi Regency in 2017. The method used by this legal research is normative, where focus data is obtained from legal norms and regulations. The results of this legal research concluded that in Sarmi Regency, the application of civil servant disciplinary punishment for violations of civil servant neutrality in the regional elections in Sarmi Regency in 2017 was not optimal because of several obstacles, namely: incomprehension of regulations regarding the neutrality of civil servants; limited authority of election supervisors; lack of cross-sectoral coordination (Bawaslu, Inspektorat, BKPSDM, and KPU); considering the activeness and performance of civil servants who violated the neutrality of civil servants; and it is difficult to impose disciplinary punishment.

Keywords: civil servant discipline, neutrality, local elections, Sarmi Regency

DAFTAR ISI

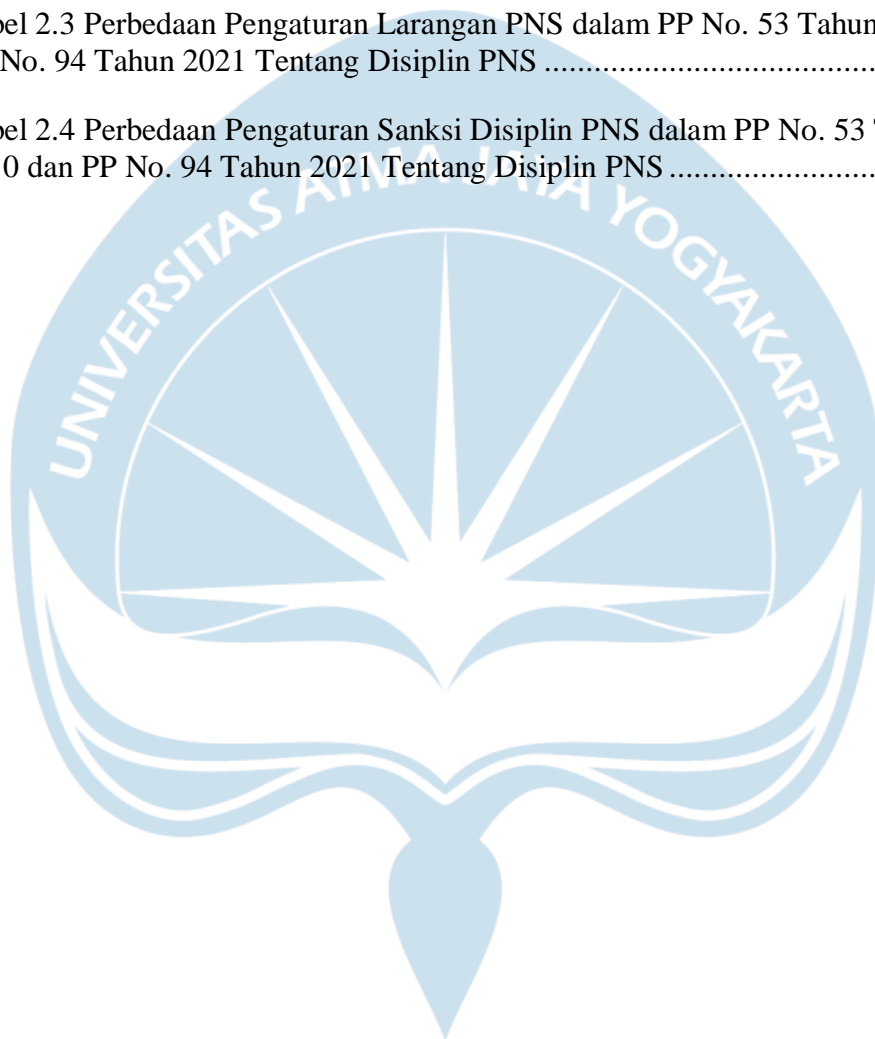
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Batasan Konsep	12
G. Metode Penelitian	15
BAB II PEMBAHASAN	20
A. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2017	20
B. Disiplin Pegawai Negeri Sipil	26
C. Penerapan Hukuman Disiplin PNS Terhadap Pelanggaran Netralitas PNS dalam Pilkada di Kabupaten Sarmi Tahun 2017	39
D. Faktor-Faktor Penghambat Diterapkannya Hukuman Disiplin PNS Terhadap Pelanggaran Netralitas PNS dalam Pilkada di Kabupaten Sarmi Tahun 2017	63
BAB III PENUTUP	68
A. Simpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Sarmi	21
Gambar 2.2 Data Pemilih Tetap dalam Pilkada Kabupaten Sarmi Tahun 2017 ...	24
Gambar 2.3 Hasil Hitung TPS (Form C1) Kabupaten Sarmi.....	25
Gambar 2.4 SOP tindak lanjut dugaan pelanggaran netralitas PNS pada Pilkada 2017.....	46
Gambar 2.5 Mekanisme penanganan pelanggaran Netralitas PNS dalam Pilkada 2017 dari pihak pengawas pemilu	47
Gambar 2.6 Mekanisme penanganan pelanggaran Netralitas PNS dalam Pilkada 2017 dari pihak pemerintah daerah.....	49
Gambar 2.7 Daftar Nama PNS yang memberikan KTP untuk mendukung salah satu pasangan calon	52
Gambar 2.8 lanjutan Gambar 2.7.....	52
Gambar 2.9 Bukti KTP PNS dalam dokumen dukungan pasangan calon Independen	53
Gambar 2.10 Bukti KTP PNS dalam dokumen dukungan pasangan calon Independen (2).....	53

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2017	24
Tabel 2.2 Perbedaan Pengaturan Kewajiban PNS dalam PP No. 53 Tahun 2010 dan PP No. 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS.....	27
Tabel 2.3 Perbedaan Pengaturan Larangan PNS dalam PP No. 53 Tahun 2010 dan PP No. 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS	31
Tabel 2.4 Perbedaan Pengaturan Sanksi Disiplin PNS dalam PP No. 53 Tahun 2010 dan PP No. 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS	36



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Skripsi yang telah disusun dengan judul “PENERAPAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP PELANGGARAN NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN SARMI TAHUN 2017” merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 September 2022

Yang menyatakan,


Annethe Lufharschia Wersemetawar